Kementerian Perindustrian

REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INSPEKTORAT I

## TAHUN 2022

INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, Juli 2022

# LAPORAN RENCANA DAN CAPAIAN KEGIATAN
# INSPEKTORAT I
# TRIWULAN II
# TAHUN 2022



## INSPEKTORAT JENDERAL
## KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
**JAKARTA, Juli 2022**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Inspektorat I dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2022.

Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 mengenai Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Laporan ini dibuat untuk melihat besaran sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Inspektorat I Kementerian Perindustrian selama Triwulan II Tahun 2022.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Inspektorat I atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya membantu Inspektorat Jenderal dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengawasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang capaian kinerja Inspektorat I periode Triwulan II Tahun 2022. Laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam merencanakan, melaksanakan pada periode berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta, 8 Juli 2022

Inspektur I

Bayu Fajar Nugroho

# DAFTAR ISI


| | | | Halaman |
|---|---|---|---|
| **HALAMAN JUDUL** | | | i |
| **KATA PENGANTAR** | | | ii |
| **DAFTAR ISI** | | | iii |
| **BAB I** | : | **PENDAHULUAN** | **1** |
| | | A. Tugas Pokok dan Fungsi | 1 |
| | | B. Latar Belakang Kegiatan/Program | 3 |
| | | C. Struktur Organisasi | 4 |
| **BAB II** | : | **RENCANA PROGRAM/KEGIATAN** | **6** |
| | | A. Program/KegiatanTahun 2022 | 6 |
| | | B. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan | 8 |
| **BAB III** | : | **PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN** | **21** |
| | | A. Hasil yang Telah Dicapai | 21 |
| | | B. Analisis Capaian Kinerja | 24 |
| | | C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan | 26 |
| | | D. Langkah Tindak Lanjut | 27 |
| **BAB IV** | : | **PENUTUP** | **28** |
| | | A. Kesimpulan | 28 |
| | | B. Saran | 29 |

**LAMPIRAN : LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN II INSPEKTORAT I TAHUN ANGGARAN 2022**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unit kerja pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja dilingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Adapun cakupan satuan kerja Inspektorat I terdiri dari 2 unit kerja pusat yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) dengan 28 satuan kerja vertikal di lingkungan yaitu 9 satuan kerja SMK, 12.satuan kerja Politeknik dan 7 satuan kerja Balai Diklat Industri

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intenal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat I bertanggungjawab pada cakupan tugasnya untuk:

1. Melaksanakan kegiatan asuransi dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal;
2. Memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unti eselon I serta penerapan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan eselon I;
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan uinit eselon I;
4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

## B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2022 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2022 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
7. Menerapkan audit berbasis resiko.

## C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha

   Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat..

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

   Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

   Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat I Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

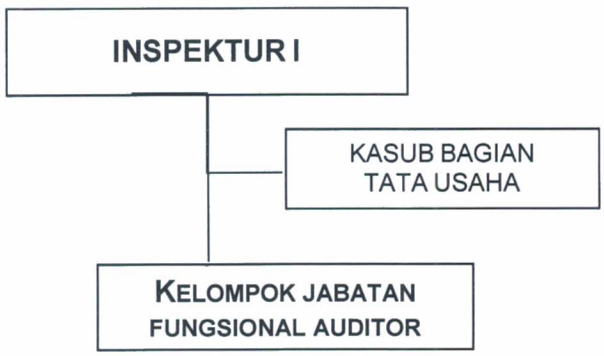


Bagan struktur organisasi Inspektorat I terdiri dari

1. Inspektur I

   Melaksanakan Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnnya.

2. Subbagian Tata Usaha

   Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat I.

3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

   Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Jumlah auditor pada Inspektorat I sebanyak 15 orang terdiri dari:

   a. Auditor Utama : 1 orang;
   b. Auditor Madya : 1 orang;
   c. Auditor Muda : 6 orang;
   d. Auditor Pertama : 7 orang.

# BAB II

# RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

## A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dan kegiatan Inspektorat I adalah **Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindtrian Cakupan Tugas Inspektorat I** dengan kegiatan kerja pada Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1. Layanan Pengawasan Internal Inspektorat I Tahun 2021

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TARGET | KET |
|---|---|---|---|
| 1. | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | 1 Dokumen | |
| 2. | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 5 Dokumen | |
| 3. | Layanan Audit Internal | 155 Laporan | |
| | Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I | 26 Laporan | |
| | Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I | 85 Laporan | |
| | Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I | 28 Laporan | |
| | Konsulting dan Pengawalan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I | 4 Laporan | |

Dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut Inspektorat I pada tahun 2022 memiliki anggaran sebesar Rp 2.108.753.000,- namun pada bulan Desember 2021 telah ditetapkan untuk dilakukan blokir mandiri sebesar Rp. 225.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2022

| KODE | OUTPUT / RINCIAN AKUN | VOLUME | PAGU |
|---|---|---|---|
| **WA** | **Program Dukungan Manajemen** | | **2.108.753.000** |
| **1841** | **Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat I** | | **2.108.753.000** |
| **1841.EBD** | **Layanan Manajemen Kinerja Internal** | | **50.000.000** |
| **952** | **Layanan Perencanaan Dan Penganggaran** | | **22.700.000** |
| ***51*** | ***Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran*** | | ***22.700.000*** |
| A | Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran | | 22.700.000 |
| **953** | **Layanan Pemantauan Dan Evaluasi** | | **27.300.000** |
| ***51*** | ***Penyusunan Dokumen Evaluasi Dan Akuntabilitas Inspektorat I*** | | ***27.300.000*** |
| A | Penyusunan Evaluasi Triwulanan Dan Tahunan | | 27.300.000 |
| **1841.TBD** | **Layanan Manajemen Kinerja Internal** | | **2.058.753.000** |
| **965** | **Layanan Audit Internal** | | **2.058.753.000** |
| ***51*** | ***Audit Program Dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I*** | | ***1.058.747.000*** |
| A | Pelaksanaan Audit Kinerja | | 1.048.287.000 |
| B | Pelaksanaan Audit Khusus | | 10.460.000 |
| ***52*** | ***Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I*** | | ***282.000.000*** |
| A | Pelaksanaan Reviu Pipk Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I | | 35.000.000 |
| B | Pelaksanaan Reviu Lk/bmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I | | 153.000.000 |
| C | Pelaksanaan Reviu Rkakl Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I | | 65.000.000 |
| D | Pelaksanaan Reviu Rkbmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I | | 29.000.000 |
| ***53*** | ***Monitoring Dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I*** | | ***73.000.000*** |
| A | Pelaksanaan Evaluasi Sakip Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I | | 73.000.000 |
| ***54*** | ***Konsulting Dan Pengawalan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I*** | | ***645.006.000*** |
| A | Pengawasan Program Dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun Berjalan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I | | 263.988.000 |
| B | Pembinaan Dan Pengawasan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I | | 142.862.000 |
| C | Sosialisasi/pendampingan Implementasi Spip Satuan Kerja Cakupan Inspektorat I | | 238.156.000 |

| | TOTAL | | 2.108.753.000 |
|---|---|---|---|

Tabel 3. Revisi Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2021

| Jenis Kegiatan | | PAGU Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I | 1.058.747.000 |
| 2 | Reviu Laporan Keuangan/bmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I | 282.000.000 |
| 3 | Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I | 73.000.000 |
| 4 | Consulting Dan Pengawalan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I | 645.006.000 |
| 6 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | 22.700.000 |
| 6 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 27.300.000 |
| **Total** | | **2.108.753.000** |

## B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat I yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Jenis Indikator | Target |
|---|---|---|---|---|
| PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN | | | | |
| 1. | Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian | Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I | **IKU** | 1,4% |
| | | Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I | **IK** | 8% |
| | | Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti | IK | 85% |
| | | Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat | **IKU** | 91% |
| 2. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Indeks penerapan Manajemen Risiko satker cakupan tugas Inspektorat I | IK | 91,5% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL | | | | |
| 3. | Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif | Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan | IK | 75% |
| | | Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) | IK | 77% |
| PERSPEKTIF KELEMBAGAAN | | | | |
| 4. | Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien | Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT | IK | 80% |
| | | Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya | IK | 80% |

| TABEL PERHITUNGAN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN | | | | |
| | | Untuk memperoleh keyakinan atas keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku | | |
| | | **Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah kurang <1,4% dari satu koma empat persen.**<br>$x \leq 1{,}4\%$<br>dimana<br>$x = \frac{\Delta mt}{\Delta aa}$ x 100%<br>$x$ : batas maksimum<br>$\Delta mt$ : Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian Perindustrian yang bernilai uang<br>$\Delta aa$ : total anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I<br>- | | |
| | | Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I | **IKU** | 8% |
| | | Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja | | |

**Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun**

$$x \leq 8\%$$

dimana

$$x = \frac{\Delta TPTD}{\Delta R} \times 100\%$$

| | | |
|---|---|---|
| $x$ | : | batas maksimum |
| ΔTPTD | : | **Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti** |
| $\Delta R$ | : | **total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun** |

| | | |
|---|---|---|
| Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti | IK | 85% |

**Jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk ke sistem dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem dumas**

$$x \geq 85\%$$

**dimana**

$$x = \frac{\Delta AT}{\Delta AM} \times 100\%$$

| | | |
|---|---|---|
| $x$ | : | batas maksimum |
| ΔAT | : | **Jumlah total pengaduan masyarakat yang terdistribusi** |
| $\Delta AM$ | : | **Jumlah total total aduan yang masuk dalam sistem** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat | **IKU** | 91% |
| | | **Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satuan kerja dibagi dengan jumlah total rekomendasi**<br>$x \geq 91\%$<br>**dimana**<br>$x = \frac{\Delta RAHP}{\Delta RHP}$ x100% | | |
| | | $x$ : batas maksimum<br>$\Delta RAHP$ : Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi<br>$\Delta RHP$ : total rekomendasi hasil pengawasan | | |
| 2. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Indeks penerapan Manajemen Risiko satker cakupan tugas Inspektorat I | **IKU** | 91,5% |
| | | **Hasil penilaian Maturitas SPIP berdasarkan quality Assurance BPKP terhadap Kementerian Perindustrian**<br>$x \geq 91{,}5\%$<br>dimana<br>$x = \frac{\Delta SMRI}{\Delta SBI}$ x 100% | | |
| | | $x$ : batas maksimum<br>$\Delta SMRI$ : **Jumlah satuan kerja yang memiliki nilai maturitas level 3**<br>$\Delta SBI$ : **Jumlah satuan kerja binaan yang dinilai** | | |
| PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL | | | | |
| 3. | Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif | Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan | IK | 75% |
| | | **Capaian Inspektorat I berdasarkan nilai yang didapatkan dari monitoring yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal** | | |
| | | Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) | IK | 76% |
| | | Menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKA-K/L | | |

<table>
<tr><td colspan="5">PERSPEKTIF KELEMBAGAAN</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</td><td>Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT</td><td>IK</td><td>70%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">Tingkat kesesuaian dalam hal jadwal dan komposisi tim dengan yang tertuang dalam dokumen PKPT<br>(dengan toleransi maksimal 1 s/d 4 hari).<br>$x \geq 70\%$<br>dimana<br>$x = \frac{\Delta RSP}{\Delta RP} x100\%$<br><table><tr><td>$x$</td><td>:</td><td>batas maksimum</td></tr><tr><td>$\Delta RSP$</td><td>:</td><td>Jumlah Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT</td></tr><tr><td>$\Delta RP$</td><td>:</td><td>Jumlah rencana Pengawasan</td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya</td><td>IK</td><td>80%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan dengan sertifikasi JFA<br>$x \geq 80\%$<br>dimana<br>$x = \frac{\Delta JFA}{\Delta JP} x\ 100\%$<br><table><tr><td>$x$</td><td>:</td><td>batas maksimum</td></tr><tr><td>$\Delta JFA$</td><td>:</td><td>Jumlah Penugasan dengan tim yang bersertifikat</td></tr><tr><td>$\Delta JP$</td><td>:</td><td>Jumlah Penugasan pengawasan</td></tr></table></td></tr>
</table>

# RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
# INSPEKTORAT I

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | | | 1841 | RESIKO UTAMA | ANGGARAN | TARGET KEGIATAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | | | | TW 1 | TW2 | TW3 | TW4 |
| **PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN** | | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian | Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I | | | | 1,4% | 1. Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I<br>2. Reviu Laporan keuangan dan BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I | | Rp. 788.241.000,-<br>Rp. 246.202.000,- | **16,73%**<br>**58,49%** | **50,18%**<br>**38,99%** | **23,00%**<br>- | **10,09%**<br>**2,52%** |
| | Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I | | | | 8% | 1. Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I | | Rp. 44.000.000,- | **45,54%** | **54,55%** | - | - |
| | Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti | | | | 85% | - | | - | - | - | - | - |
| | Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat I *)IKU | | | | 91,5% | - | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Indeks penerapan Manajemen Risiko satker cakupan tugas Inspektorat I | | | | 91,5% | Consulting dan Pengawalan Pelaksanaan Program Kegiatan Cakupan Tugas Inspektorat I | | Rp. 486.167.000,- | **32,67%** | **32,67%** | **32,67%** | **1,99%** |
| **PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL** | | | | | | | | | | | | |
| Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif | Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan | | | | 75% | | | - | - | - | - | - |
| | Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) | | | | 77% | | | - | - | - | - | - |
| **PERSPEKTIF KELEMBAGAAN** | | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien | Tingkat keseuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT | | | | 80% | Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I | | Rp. 32.070.000,- | **24,95%** | **24,95%** | **25,18%** | **24,92%** |
| | Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya | | | | 90% | Evaluasi Kegiatan Inspektorat I | | Rp. 8.320.000,- | **28,25%** | **28,25%** | **28,25%** | **15.25%** |

**CAPAIAN RENCANA AKSI**

| SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | | TARGET TW I | | PIC | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RENCANA | REALISASI | | |
| **PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN** | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian | 1 | | | | | |

| SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | | TARGET TW II | | PIC | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RENCANA | REALISASI | | |
| **PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN** | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian | 1 | | | | | |

| SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | | TARGET TW III | | PIC | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RENCANA | REALISASI | | |
| **PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN** | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian | 1 | | | | | |

| SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | | TARGET TW IV | | PIC | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RENCANA | REALISASI | | |
| **PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN** | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian | 1 | | | | | |

Sehubungan dengan berubahnya kebijakan pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi akibat pandemic terjadi perubahan-perubahan rencana strategis Kementerian Perindustrian sehingga sasaran perkin diubah menjadi, sebagai berikut:

**RENSTRA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2022**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Target 2023 | Target 2024 | Pengelola Indikator | Cara Pengukuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Stakeholders Perspective*** | | | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian | 1 | Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU | 1,50% | 1,40% | 1,30% | 1,20% | 1,00% | Ir I, II, III, IV | Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,4% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin TA 2020 |
| | | 2 | Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | Ir I, II, III, IV | Jumlah aduan yang telah masuk ke sistem Dumas berkadar pengawasan dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan berkadar pengawasan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas |
| | | 3 | Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker *) IKU | 91% | 91,50% | 92% | 92,50% | 93,00% | Ir I, II, III, IV | Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasI atau rumus: (SR+BSR)/total rekomendasi (T-1), Misal: Penyusunan laporan kinerja tahun 2021, maka data yang digunakan adalah data audit yang dilakukan ditahun Januari-Desember tahun 2020 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik | 1 | Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 4 | Ir I, II, III, IV | Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan QA oleh APIP (jika memungkinkan,dilakukan usulan revisi target berdasarkan range level 3 ke Biro Perencanaan) |
| ***Internal Process Perspective*** | | | | | | | | | | |
| 3 | Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif | 1 | Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal | 75% | 75% | 80% | 80% | 85% | Ir I, II, III, IV | Dapat diukur melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner yang disusun berdasarkan AAIPI. Pada tahun 2022, kuesioner akan disebarkan setiap kali melakukan kegiatan pengawasan dan diolah oleh masing-masing Kasubag Tata Usaha Setiap Inspektorat disetiap akhir Triwulan dan setiap akhir tahun. Persentase tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan diperoleh berdasarkan respon auditi yang masuk dan berada pada tingkat "sangat baik". Nilai 100% diperoleh jika seluruh auditi menjawab "sangat baik" atau nilai maksimal dari setiap pertanyaan untuk semua pertanyaan dan simpulan akhir kuesioner. Cara pengukuran mengacu pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer) | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | Ir I, II, III, IV | Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit<br>- Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling<br>- Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshoot penggunaan aplikasi) *pemberian akses ke seluruh auditor<br>- Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll)<br>*Bukti Hasil Telaahan pada semua keg Pengawasan<br>-Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll)<br>- Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data<br>- Tahap Pelaporan<br>menggunakan Office |
| 4 | Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri | 1 | Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat I/II/III/IV/ *)IKU | belum ada | 75% | 80% | 85% | 90% | IR I, II, III, dan IV | $RA_{P3DN}$ = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN.<br>$TotA_{P3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.<br>$TotA_{P3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.<br>Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Learn & Growth Perspective*** | | | | | | | | | | |
| 5 | Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien | 1 | Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | Ir I, II, III, IV | Menghitung persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT. |
| | | 2 | Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | Ir I, II, III, IV | Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki |

Sebagaimana tertuang dalam tabel diatas, seluruh sasaran program tersebut telah tertuang dalam perjanjian kinerja Inspektorat I Tahun 2022. Dalam ragka mencapai sasaran-sasaran tersebut dilaksankan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam DIPA Inspektorat I, yang dapat dilaksanakan melalui:

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

   Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan:

   a. Audit Internal
      - Melaksanakan audit kinerja pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
      - Melaksanakan audit khusus dengan penugasan Menteri pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal

   b. Reviu
      - Melaksanakan reviu LK-BMN pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
      - Melaksanakan reviu pengadaan barang dan jasa dengan penugasan Menteri pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
      - Melaksanakan reviu anggaran pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal

   c. Monitoring
      - Melaksanakan penilaian SAKIP unit Eselon II dan UPT pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

   Sasaran ini dicapai dengan melaksanakanpendampingan implemaentasi manajemen resiko, sosialisasi, dan pembinaan pengawasan

3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

   Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan;

4. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

   Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan dan menerapkan penjaminan kualitas yang memadai;

# BAB III
# PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

## A. Hasil yang Telah Dicapai

Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sesuai **aplikasi PP39** telah mencapai 24,36% atau sebesar Rp. 513.692.230,- dari target 21,68%, sedangkan realisasi fisik sebesar 23,55% dari target fisik sebesar 25,94%.

Sesuai dengan aplikasi *e-Monitoring* dan monitoring secara manual, realisasi anggaran Inspektorat I s/d triwulan II telah mencapai 63,11% atau sebesar Rp. 1.330.834.018,- dari target 59%.

Terdapat perbedaan realisasi anggaran pada aplikasi PP39 dengan aplikasi *e-Monitoring* yang disebabkan karena adanya perbedaan waktu penginputan SP2D karena mekanisme TUP. Sementara itu, realisasi fisik kegiatan Inspektorat I sesuai aplikasi *e-Monitoring* telah mencapai 59,70% dari target sebesar 63,81%. Hasil ini masih telah memenuhi rencana kegiatan yang ditargetkan dengan pelaksanaan, dengan yang tidak bisa di triwulan sebelumnya dapat diselesaikan dengan baik sampai dengan akhir triwulan III.

Realisasi fisik dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat I dapat dilihat pada Tabel 5. dan Tabel 6.

Tabel 5. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

| Output | PAGU Anggaran | Triwulan ini | | | s/d Triwulan Ini | | | Sisa Anggaran s/d Triwulan IV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fisik (%) | Keuangan (Rp,-) | % | Fisik (%) | Keuangan (Rp) | % | Fisik (%) | Keuangan (Rp,-) | % |
| **TAK Layanan Pengawasan Internal** | **2.108.753.000** | **23.55** | **513.692.230** | **24,36** | **63,81** | **1.330.834.018** | **63,11** | **26,19** | **777.918.981,70** | **26,89** |

Tabel 6. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

| Jenis Kegiatan | | PAGU Anggaran | Triwulan Ini | | | s/d Triwulan Ini | | | Sisa Anggaran s/d Triwulan IV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Fisik (%) | Keuangan (Rp,-) | % | Fisik (%) | Keuangan (Rp,-) | % | Fisik (%) | Keuangan (Rp,-) | % |
| 1 | Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I | 1.085.753.000 | 13,00 | 67.000.485 | 8,5 | 85 | 694.039.809 | 65,55 | - | 391.713.191 | 36,07 |
| 2 | Reviu Laporan Keuangan/bmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I | 282.000.000 | 23,22 | 50.995.600 | 0,79 | 55 | 148.600.000 | 52,70 | - | 133.400.000 | 47,30 |
| 3 | Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I | 73.000.000 | 100 | 73.000.000 | 100 | 100 | 73.000.000 | 100 | - | 0 | 0 |
| 4 | Consulting Dan Pengawalan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I | 645.000.000 | 24,11 | 181.362.915 | 28,11 | 100 | 385.871.330 | 59,83 | - | 259.128.670 | 40,17 |
| 6 | Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I | 22.700.000 | 50,00 | 4.219.930 | - | 100 | 16.220.000 | 71,45 | - | 6.480.000 | 28,54 |
| 6 | Evaluasi Kegiatan Inspektorat I | 27.300.000 | 50,00 | 13.759.200 | 50,40 | 50 | 13.759.200 | 50,40 | - | 13.540.800 | 49,60 |
| **Total** | | **2.108.753.000** | **23,55** | **115.078.500** | **24,36** | **100** | **698.077.828** | **63,81** | **-** | **777.918.981,-** | **26,89** |

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat I pada Triwulan II Tahun Anggaran 2021 (April– Juni 2022) sebagai berikut:

1. ST 350 Audit Kinerja dan Pengelolaan BMN pada Sekjen Maret sampai Juni
2. ST 770 Webinar Gratifikasi Benturan kepentingan dan Whistleblowing System
3. ST 768 Survei Pendahuluan Audit BPSDMI
4. ST 740 webinar Peningkatan Kapasitas Advisor dan Stakeholder Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
5. ST 685 Pemantau Gedung STTT Bandung
6. ST 737 Webinar Kebijakan Pengelolaan Keuangan Haji untuk Kemaslahatan Umat
7. ST 736 Webinar Reformasi Tata Kelola Belanja Daerah dalam Undang2 HKPD
8. ST 712 Webinar Public Speaking
9. ST 713 Webinar Risk Management Based on ISO
10. ST 649 Webinar Training Akuntansi forensik dan Audit Investigatif
11. Koordinasi Rencana Pembangunan Gedung IMC di Yogyakarta
12. ST 683 Mengikuti Webinar Effective Technique for Internal Audit
13. ST 682 Mengikuti Webinar Certified Ice Breaker
14. ST 708 Webinar Sambungan Komponen Precast pada Sistem Half Slab
15. ST 709 Webinar Flood Risk Assesment
16. ST 707 Webinar SPBE
17. Melakukan Audit Kinerja pada SMK SMTI Banda Aceh
18. Melakukan Audit Kinerja pada SMK SMTI Pontianak
19. Melakukan Audit Kinerja pada BDI Denpasar
20. Melakukan Audit Kinerja pada Politeknik Bantaeng
21. Melakukan Audit Kinerja pada Politeknik Morowali
22. Melakukan Reviu PAPBJ TW II pada BPSDMI

## B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat I s/d Triwulan II Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | CAPAIAN TW II | TINDAK LANJUT |
|---|---|---|---|---|---|
| STAKEHOLDER | | | | | |
| 1 | Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian | Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada Cakupan Tugas Inspektorat I/II/III/IV *)IKU | 1,3% | Belum dilakukan pengukuran dikarenakan masih dalam proses pemeriksaan BPK | |
| | | Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada Cakupan Tugas Inspektorat I/II/III/IV | 90% | 100% | Berdasarkan Nota Dinas Nomor 5/IJ.IND.1/KK/V/2022 terdapat 2 pengaduan masyarakat berkadar pengawasan secara online dari total 108 pengaduan hingga 30 April 2022 |
| | | Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker Cakupan Tugas Inspektorat I/II/III/IV *)IKU | 92% | Belum dapat diukur dikarenakan masih dalam proses 90 hari | |
| 2 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU | Level 3 | Belum dapat diukur dikarenakan masih dalam proses 90 hari | Berkoordinasi dengan sekretariat untuk proses pemantauannya |
| BUSSINES PROCESS | | | | | |
| 3 | Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif | Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat I/II/III/IV | 80% | s/d bulan Juni 2022 nilai SKM 3,73 dengan kesimpulan sangat baik | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) | 78% | 100% | kegiatan audit dan reviu telah dilaksanakan Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling<br>- Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshoot penggunaan aplikasi)<br>*pemberian akses ke seluruh auditor<br>- Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll)<br>*Bukti Hasil Telaahan pada semua keg Pengawasan<br>-Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll)<br>- Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data<br>- Tahap Pelaporan menggunakan Office |
| LEARN AND GROWTH | | | | | |
| 4 | Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri | Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Insepektorat I *)IKU | 80% | Total realisasi pada akun indikator P3DN adalah 63,11% dengan rincian 1,3 M dari total pagu | Terdapat pengukuran yang tidak dapat menunjukkan target antara. |
| 5 | Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien | Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT | 90% | 96% | s/d bulan Juni dari 125 penugasan Kegiatan telah dilakukan sesuai dengan jadwal di PKPT |
| | | Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya | 100% | 80% | Kegiatan audit terdapat auditor muda yang masih diperankan sebagai anggota tim karena masih kekurangan anggota. |

## C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I, terdapat hambatan dan kendala sebagai berikut:

1. Tidak semua kegiatan dapat mendukung kinerja dikarenakan adanya pemotongan anggaran, sehingga pencapaian kinerja tidak berdampak secara signifikan terhadap kinerja Inspektorat Jenderal.
2. Metode *work from home* berdampak terhadap prosedur dan kegiatan Inspektorat I, yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan mengalami transisi dan perubahan prosedur.

## D. Langkah Tindak Lanjut

Langkah tindak lanjut atas hambatan dan kendala yang dihadapi pada triwulan II untuk meningkatkan kinerja Inspektorat I adalah melalui peningkatan kerjasama yang sinergis antara lain :

1. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
2. Membudayakan pengendalian resiko ke seluruh satuan kerja sehingga memudahkan pelaksanaan pengawasan.
3. Menerapkan prosedur pengawasan yang berbasis ssstem informasi di Inspektorat Jenderal.

# BAB IV
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan kegiatan Inspektorat I Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan II Tahun 2022 telah berjalan baik sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sesuai **aplikasi PP39** telah mencapai 24,36% atau sebesar Rp. 513.692.230,- dari target 21,68%, sedangkan realisasi fisik sebesar 23,55% dari target fisik sebesar 25,94%.

Sesuai dengan aplikasi *e-Monitoring* dan monitoring secara manual, realisasi anggaran Inspektorat I s/d triwulan II telah mencapai 63,11% atau sebesar Rp. 1.330.834.018,- dari target 59%.

Terdapat perbedaan realisasi anggaran pada aplikasi PP39 dengan aplikasi *e-Monitoring* yang disebabkan karena adanya perbedaan waktu penginputan SP2D karena mekanisme TUP. Sementara itu, realisasi fisik kegiatan Inspektorat I sesuai aplikasi *e-Monitoring* telah mencapai 59,70% dari target sebesar 63,81%. Hasil ini masih telah memenuhi rencana kegiatan yang ditargetkan dengan pelaksanaan, dengan yang tidak bisa di triwulan sebelumnya dapat diselesaikan dengan baik sampai dengan akhir triwulan III.

Realisasi ini tidak tidak dapat terukur secara *real time* karena terdapat perbedaan cut off data yang menimbulkan perbedaan data yang signifikan dikarenakan jadwal penginputan yang terkendala karena situasi pandemic yang memaksa bukti-bukti fisik yang harus dilampirkan dalam penginputan tertunda penyampaiannya, sehingga data yang terinput belum menunjukkan realisasi secara *real time*.

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi, namun berkenaan dengan situasi dan kondisi

pandemic pelaksanaan mengikuti kebijakan pemerintah terkait penanggulangan situasi pandemik. Upaya yang dapat dilakukan adalah menciptakan prosedur atau Langkah-langkah tertentu untuk mengatasi masalah-masalah pelaksanaan pekerjaan yang hanya bisa diselesaiakan di kantor agar dapat diselesaikan kapan saja dan dimana saja.

## B. Saran

Kerjasama dan koordinasi sinergi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat I baik internal maupun eksternal perlu lebih ditingkatkan untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan baik oleh Inspektorat I.

Demikian Laporan Inspektorat I periode Triwulan II Tahun 2022 untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

# LAMPIRAN

## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

## TRIWULAN – II

## TAHUN ANGGARAN 2022

## INSPEKTORAT I

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

| No | Output | Kendala | Tindak Lanjut yang Diperlukan | Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| . | - | TIDAK ADA KENDALA | - | - |

Jakarta Selatan, 8 Juli 2022

Inspektur I Inspektorat Jenderal

Bayu Fajar Nugroho, ST, MPP

## III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

| Output | S.D. Triwulan Lalu (%) | | | | Triwulan Ini (%) | | | | S.D. Triwulan Ini (%) | | | | Lokasi Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Keuangan | | Fisik | | Keuangan | | Fisik | | Keuangan | | Fisik | | |
| | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal | - | 24.00 | 33.62 | 33.62 | 20.00 | 35.96 | 13.65 | 13.65 | 20.00 | 59.96 | 47.27 | 47.27 | DKI JAKARTA |
| TBD Layanan Manajemen Kinerja Internal | 38.23 | 34.44 | 37.97 | 36.22 | 21.72 | 24.08 | 26.24 | 23.79 | 59.95 | 58.52 | 64.21 | 60.00 | DKI JAKARTA |
| **Jumlah** | **37.32** | **34.19** | **37.87** | **36.15** | **21.68** | **24.36** | **25.94** | **23.55** | **59.00** | **58.55** | **63.81** | **59.70** | |

**FORMULIR A**

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
# TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022
# INSPEKTORAT I

## I. DATA UMUM

| | |
|---|---|
| 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi | : (247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
| 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi | : 04. Ekonomi |
| 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi | : 04.07. Industri Dan Konstruksi |
| 4. Nomor Kode dan Nama Program | : 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen |
| 5. Indikator Hasil | : |
| 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan | : **1841 - Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tug** |
| 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke | : 1/1 |
| 8. Penanggung Jawab Kegiatan | : Bayu Fajar Nugroho, ST, MPP |
| 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan | : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 5 |
| 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA | : SP DIPA- 019.06.1.247885/2022 |

## II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

| Nomor Kode dan Nama Output | Anggaran (Rp. 000) | | | | Indikator Keluaran (Output) | Satuan (Unit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. Loan | PHLN | Rupiah | Total | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal | | - | 50,000 | 50,000 | | 6 Dokumen |
| TBD Layanan Manajemen Kinerja Internal | | - | 2,058,753 | 2,058,753 | | 155 Dokumen |
| **Total** | | **-** | **2,108,753** | **2,108,753** | | |